



SERTIFIKAT

Diberikan kepada,

WEWEN KUSUMI RAHAYU , S.AP, M.Si

Atas partisipasinya sebagai,

Pemateri

Dalam acara Pengabdian Masyarakat Jurusan Administrasi Publik
FISIP UNAND dengan tema “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Stakeholder untuk
Pengembangan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Berbasis Nagari”
di Kecamatan Pauh Kota Padang, Sabtu - Minggu, 17-18 November 2018

Mengetahui,
Ketua LPPM UNAND


Dr. Uyung Gatot S. Dinata, MT
NIP : 19660709199203 1 003

Jurusan Administrasi Publik
Ketua,


Dr. Ria Ariany, M.Si
NIP : 197302132008122001

PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Oleh: Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si

Disampaikan pada Kegiatan Pengabdian Berbasis Program Studi

Jurusan Administrasi Publik

Fisip, Universitas Andalas

Padang, Sabtu/ 17 November 2018

- Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
- Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas.
- Perempuan sebagai warga negara mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan.
- Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa.

- Peran Perempuan dalam Pembangunan adalah kegiatan, tugas, ataupun partisipasi perempuan yang mencakup sektor domestik maupun sektor publik pada masa sekarang yang dikenal dengan masa pembangunan.
- Peran pada sektor publik dan domestik tersebut menimbulkan peran ganda.
- Peran ganda tersebut mendorong munculnya permasalahan ditengah-tengah masyarakat.

GENDER

- Menurut Fakih, Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat dan bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural.

GENDER menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:

- Salah satu jenis kelamin dirugikan,
- Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya,
- Salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis kelamin lain,
- Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.

ISU GENDER BIDANG PENDIDIKAN

1. Jumlah perempuan yang menyandang buta aksara dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki
2. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki
3. Masih terjadi gejala segragasi gender(gender segregation) dalam pemilihan jurusan atau program studi di SMU, SMK dan Perguruan Tinggi.
4. Kelanjutan studi bagi anak, bila dana terbatas yang mendapat prioritas adalah anak laki-laki meskipun prestasinya lebih rendah dari anak perempuan.
5. Bacaan dan ilustrasi gambar pada bahan ajar masih menunjukkan peran laki-laki dan perempuan yang tidak sama yakni publik dan domestik

ISU GENDER

BIDANG EKONOMI

1. Angkatan kerja perempuan baik di perkotaan maupun pedesaan lebih rendah dibanding laki-laki :
($P = 45,47\% < L = 81,19\%$)
2. Upah/gaji yang diterima pekerja perempuan jauh lebih rendah dari yang diterima pekerja laki-laki (pedesaan dan perkotaan)
3. Tingkat pengangguran terbuka pada perempuan lebih besar dari laki-laki ($P = 7,50\%$; $L = 6,7\%$) di pedesaan dan perkotaan
4. Jabatan pada tataran manajemen di perusahaan negara maupun swasta didominasi karyawan laki-laki

ISU GENDER

BIDANG KESEHATAN

1. Rendahnya partisipasi laki-laki dalam pelaksana KB (pemakaian alat KB) dan kesehatan reproduksi.
2. Tindakan aborsi yang hanya menimpa dan dirasakan kaum perempuan, sementara kaum laki-laki yang menjadi salah satu penyebab cenderung/sebagaian tidak mau bertanggung jawab .

ISU GENDER DALAM KELUARGA

1. Pembagian tugas dalam keluarga, istri lebih pada pekerjaan domestik, dan ayah pada tugas publik
2. Dalam menentukan sikap politik terhadap partai tertentu, para istri mengikuti suami
3. Kebiasaan makan dalam keluarga mendahulukan bapak/suami dan anak laki-laki

ISU GENDER DALAM BIDANG POLITIK

- 1. Kedudukan dan peran perempuan pada kepengurusan partai politik lebih rendah dibandingkan laki-laki**
- 2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik di pusat (DPR RI , DPD RI) maupun daerah (DPRD Kab/Kota) sangat kecil dibandingkan laki-laki**
- 3. Di bidang eksekutif posisi seperti Gubernur, Bupati,Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, didominasi kaum laki-laki**
- 4. Posisi seperti Hakim, Jaksa, Hakim Agung, lebih banyak diduduki oleh kaum laki-laki dibanding perempuan**
- 5. Di lembaga eksekutif semakin tinggi tingkat eselon semakin banyak jumlah laki-laki yang menduduki**
- 6. Jumlah anggota kabinet/menteri lebih banyak laki-laki dibanding perempuan**

FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB

1. Berkembangnya Ideologi Patriarki (Konstruksi sosial masyarakat yang menomorduakan perempuan)---kuatnya nilai budaya
2. Paham ideologi patriarki yang masih melekat kuat pada sebagian besar masyarakat (termasuk dalam rumah tangga)
3. Relasi gender yang tidak seimbang
4. Tingkat pendidikan perempuan yang rendah
5. Ketidakterlibatan perempuan dalam penentuan keputusan pada berbagai masalah kehidupan

STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan

PUG adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai **AKSES, PARTISIPASI , KONTROL** terhadap sumber daya, dan memperoleh **MANFAAT** pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah (INPRES 9/2000 TENTANG PUG DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL)

DASAR KEBIJAKAN

- Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 menegaskan PUG dalam semua tahapan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
- PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Azas Permendagri No, 15 Tahun 2008

STRATEGI NASIONAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PUG

1. Pembangunan nasional berperspektif gender dan peduli anak
2. Pengembangan kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki
3. Pengembangan kemitraan dan jaringan kerja
4. Pengembangan indikator
5. Pengembangan sistem penghargaan
6. Perluasan pendidikan bagi anak perempuan
7. Pengembangan sistem informasi manajemen

TUJUAN PEMBANGUNAN DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER

- Meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- Meningkatkan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan.
- Pengintegrasian perspektif gender pada semua tahap pembangunan.
- Penguatan kelembagaan PUG dari pusat hingga daerah.

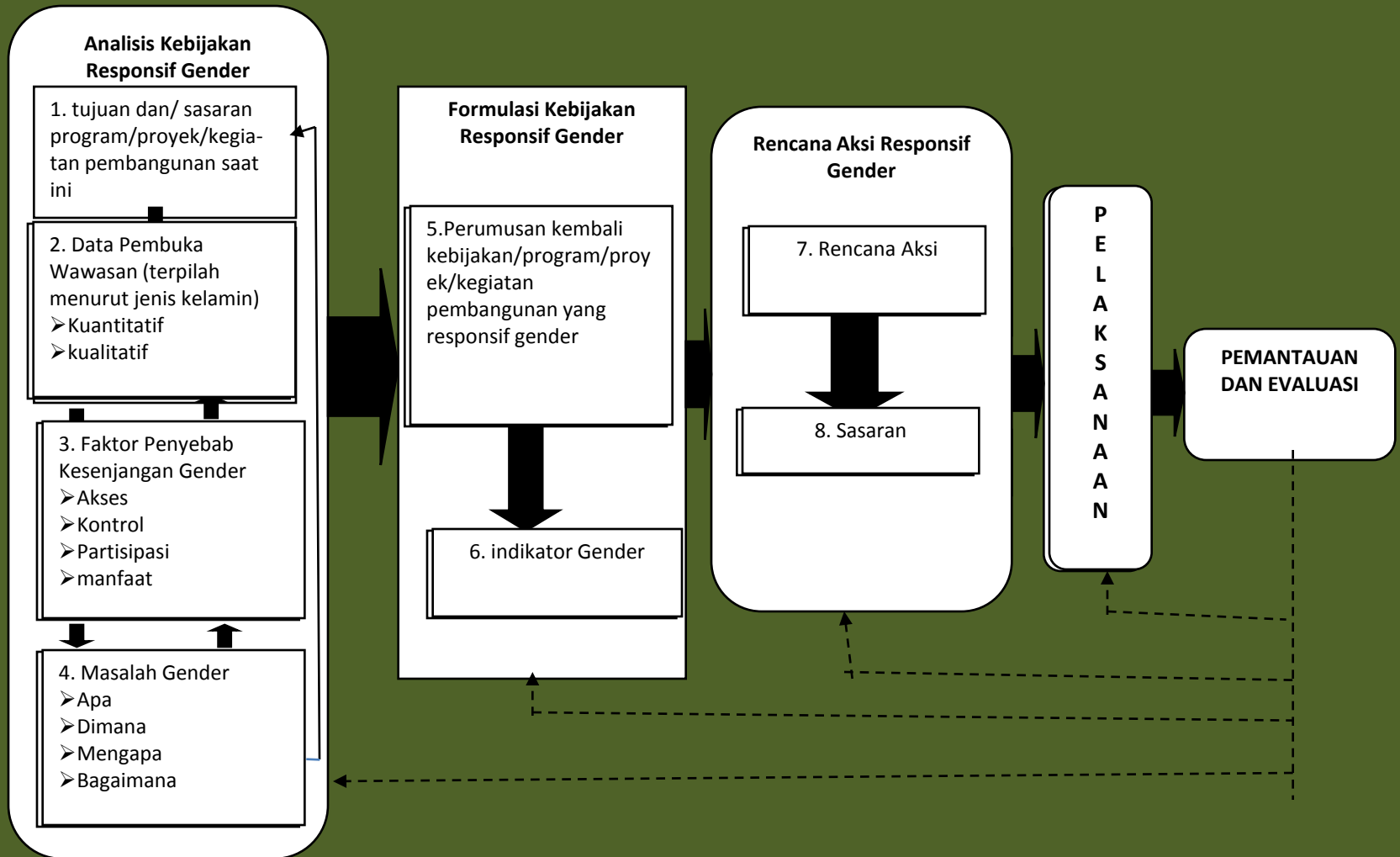
MANFAAT PUG DALAM PEMBANGUNAN

- Mendapatkan hak yang sama terhadap sumber daya pembangunan.
- Menimbulkan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan pada proses pembangunan.
- Mendapatkan hak yang sama dalam mengontrol/ mengawasi pembangunan.
- Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

BAGAIMANA MELAKUKAN PEMBANGUNAN YANG RESPONSIF GENDER?

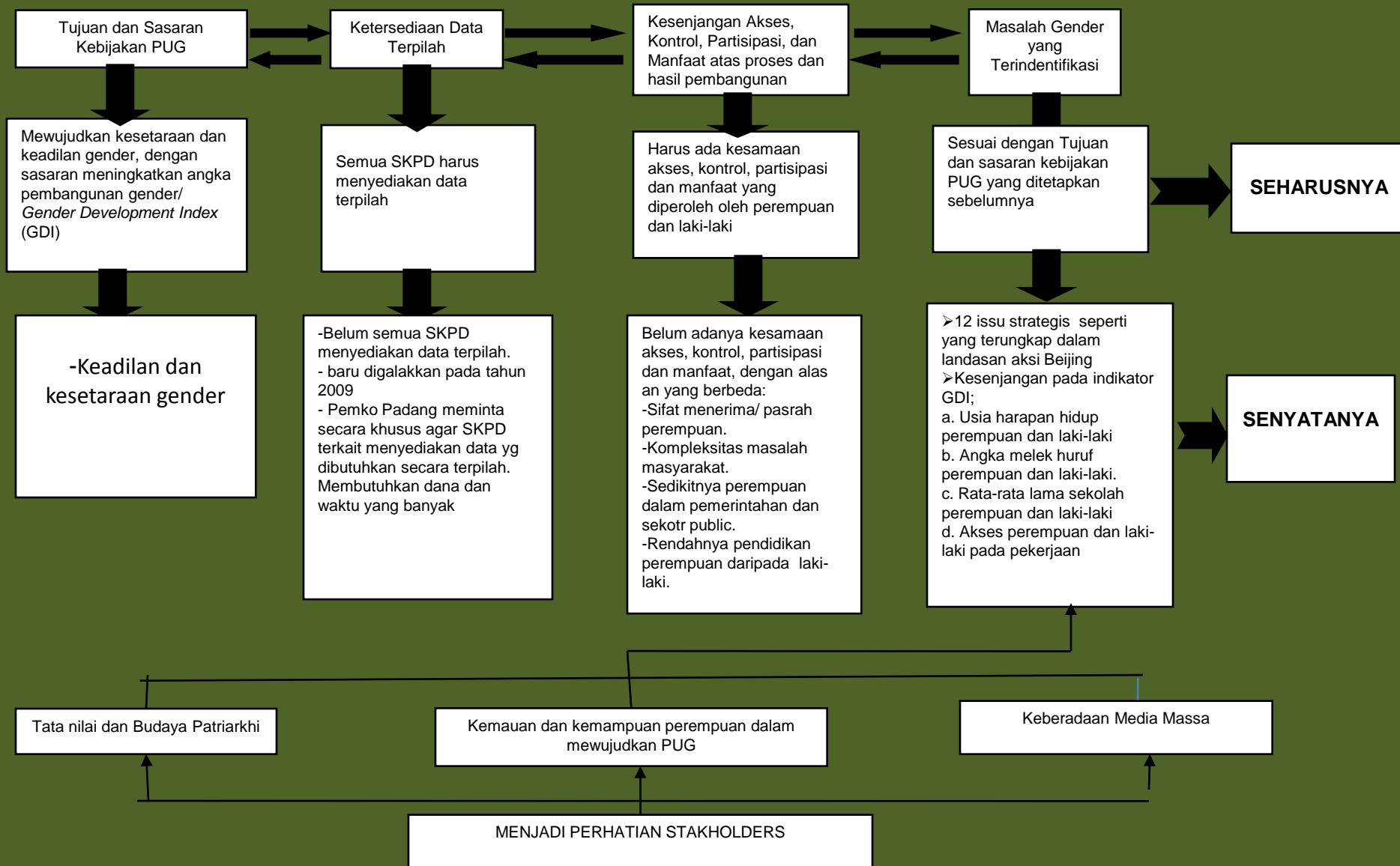
- Dalam melakukan keseluruhan proses penyusunan program pembangunan agar responsif gender (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan), diperlukan piranti analisis gender.
- Salah satu alat analisis gender adalah *“Gender Analysis Pathway”* (GAP), atau Alur Kerja Analisis Gender.

Gender Analysis Pathway



Sumber: Panduan Pelaksanaan Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Indonesia, 2002;37

HASIL ANALISIS KEBIJAKAN PUG DENGAN GAP



PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA PADANG

Untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan maka dibentuklah Perda Kota Padang No. 2 tahun 2014 tentang Pengembangan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan

Tujuan:

Terbentuknya masyarakat perempuan yang mandiri dan bisa meningkatkan ekonomi mereka serta membentuk lembaga-lembaga dan kelompok perempuan berdasarkan inisiatif sendiri

BENTUK PERANAN PEREMPUAN

- Memiliki ketrampilan dan keahlian dalam bekerja sehingga bisa menopang perekonomian keluarga.
- Peningkatan kegiatan pada organisasi sosial seperti PKK, posyandu, kelompok kajian guna mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan.

PENUTUP

- Semua stakeholders harus turut aktif dalam setiap tahap proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi)
- Stakeholders harus merubah pola pikir penilaian terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga tidak menimbulkan stereotipe.
- Perempuan harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk terlibat aktif dalam setiap tahap pembangunan.

LAPORAN

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS PRODI**



**PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS
STAKEHOLDER UNTUK PENGEMBANGAN
PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
BERBASIS KELURAHAN DI KECAMATAN PAUH
KOTA PADANG**

OLEH :

1. ROZIDATENO PUTRI HANIDA, S.IP.,M.PA
2. DR. RIA ARIANY, M.Si
3. KUSDARINI, SIP, MPA
4. DRS. YOSERIZAL, M.Si
5. ROZA LIESMANA, SIP.M.PA
6. DR. SYAMSURIZALDI, S.IP.,SE., MM
7. WEWEN KUSUMI RAHAYU, S.AP.,M.Si
8. ILHAM ALDELANO AZRE, S.IP.,MA.
9. MISNAR SITRIWANTI, S.AP.,M.Si
10. DR. RONI EKHA PUTERA, S, IP, M.PA
11. M. ICHSAN KABULLAH, S.IP, M.Si

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS ANDALAS
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pelatihan Peningkatan Kapasitas *Stakeholder* Untuk Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan Di Kecamatan Pauh Kota Padang

1. Mitra : KAN Nagari Pauh V
Nama : H. Bustamam, Dt Kayo
NIP : -
Alamat : Kecamatan Pauh
No Hp : 081374013456
2. Ketua Tim Pengusul :
a. Nama : Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA
b. NIP : 198111072003122001
c. Jabatan/Golongan : Penata /III c
d. Jurusan/Fakultas : Administrasi Publik/FISIP
e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
f. Bidang Keahlian : Kebijakan Publik
g. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : Fisip Unand Kampus Limau Manih Padang/ 0751-71266
h. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : Jl. Bariant Indah II no 75 Anduriang Padang 25151/
ozidateno@gmail.com
3. Anggota Tim Pengusul :
a. Jumlah Anggota : 8 orang Dosen
b. Nama-nama Anggota Tim
 1. Dr. Ria Ariany, M.Si
 2. Kusdarini, S.IP., M.PA
 3. Drs. Yoserizal, M.Si
 4. Dr. Syamsurizaldi, S.IP., SE., MM.
 5. Roza Liesmana, S.IP., M.Si.
 6. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP., M.AP.
 7. Ilham Aldelano Azre, S.IP., M.AP.
 8. Misnar Sitriwanti, S.AP., M.AP.
 9. Dr. Roni Ekha Putera, S, Ip, M.Pa
 10. M. Ichsan Kabullah, S.Ip, M.Si
4. Lokasi Kegiatan/Mitra :
a. Wilayah Mitra : Kecamatan Pauh
b. Kabupaten/Kota : Kota Padang
c. Provinsi : Sumatera Barat
d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 10 km
5. Luaran yang dihasilkan : Jasa dan Laporan Kegiatan
5. Jangka waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
7. Biaya Total : Rp. 10.000.000,00
8. Sumber : BOPTN UNAND

Padang, 16 Desember 2018
Ketua Tim Pengusul

Mengetahui
Ketua Jurusan Adm. Publik

(DR. RIA ARIANY, M.Si)
NIP/NIR 197302132008122001


(Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA)
NIP: 198111072003122001

Menyetujui
Dekan FISIP

(DR. ALFIAN MIKO, M.Si)
NIP/NIR: 196206211988111001

A. Judul Kegiatan :

Pelatihan Peningkatan Kapasitas *Stakeholder* Untuk Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan Di Kecamatan Pauh Kota Padang

B. Analisis Situasi

Pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, dalam Sidang umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) secara resmi telah disahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan tersebut sangat dibutuhkan gerakan Pemberdayaan perempuan dan kampanye kesetaraan gender. Beberapa hal yang menjadi maksud dan tujuan SDGs terkait gender adalah Menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat. Dalam konfigurasi politik yang demokratis, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kehendak-kehendak rakyat dengan cara merumuskan kebijakan yang demokratis dan bekerja secara proporsional (Ibrahim, 2009:8), salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mendorong partisipasi politik perempuan. Data pada tabel 1 memberikan gambaran kepada pembaca bahwa partisipasi perempuan secara jumlah masih jauh dari yang di harapkan

Tabel 1
Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

Provinsi	Kepala Desa /Lurah			Sekretaris Desa/Lurah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Aceh	6212	32	6244	5456	101	5557
Sumatera Utara	5458	319	5777	4640	971	5611
Sumatera Barat	1045	66	1111	688	317	1005
Riau	1635	43	1678	1524	124	1648
Jambi	1467	47	1514	1260	92	1352
Sumatera Selatan	2854	182	3036	2541	309	2850
Bengkulu	1413	69	1482	1274	130	1404
Lampung	2422	142	2564	2098	131	2229
Bangka Belitung	338	19	357	235	80	315
Kepulauan Riau	372	24	396	224	37	261

Sumber: *Potensi Desa 2014, BPS (2014)*

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 masih rendahnya jumlah perempuan yang berpartisipasi. Di Sumatera Barat hanya 66 orang lurah/kepala desa perempuan dari total 1111 lurah/kepala desa, angka yang sangat kecil sekali, hanya 5,9 persen. Dan untuk sekretaris desa/Lurah di Sumatera Barat berjumlah 317 dari 1.005 orang sekretaris desa/lurah atau sekitar 31 persen.

Di Kota Padang untuk mendorong keterlibatan perempuan tersebut pada tahun 2014 ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Peranan Perempuan

Dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan. Dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa menerima dan membuka ruang pada kaum perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan yang tercermin dalam susunan kepengurusan lembaga pemberdayaan masyarakat perempuan paling tinggi 30% (persen) perempuan. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya masyarakat perempuan yang mandiri serta bisa meningkatkan ekonomi mereka kemudian terbentuknya lembaga-lembaga dan kelompok perempuan berdasarkan inisiatif sendiri. Walaupun sudah di atur dalam Peraturan Daerah, akan tetapi peran perempuan itu masih terbata, hal ini di karenakan kurangnya dukungan stakeholder.

Pemangu kepentingan (*stakeholder*), yaitu semua pihak di dalam sebuah struktur masyarakat, yang bisa terdiri atas individu, komunitas yang memiliki keterkaitan kepentingan terhadap sebuah persoalan merupakan aktor penting dalam setiap gerak langkah perubahan dalam pembangunan. Upaya mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan maka diperlukan mempertimbangkan berbagai pendekatan, baik pendekatan sektoral maupun kewilayahannya serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Kota Padang. Dalam kerangka meningkatkan sinergisitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di kota Padang, dibutuhkan suatu kegiatan peningkatan kapasitas bagi seluruh *Stakeholders* dalam rangka memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

Tabel 2: Jenis *Stakeholders*

No	Jenis <i>Stakeholders</i>	Pengertian <i>Stakeholders</i>	Yang termasuk kedalam <i>Stakeholders</i>
1.	<i>Stakeholders</i> Utama	Merupakan <i>stakeholders</i> yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat kelurahan di lingkungan kecamatan Pauh 2. Niniak mamak dan pemuka masyarakat di 2 kanagarian dalam kecamatan Pauh 3. Pemuda 4. Bundo Kanduang 5. Kelompok Perempuan 6. Camat Kecamatan Pauh.

2.	<i>Stakeholders</i> Pendukung	<i>Stakeholders</i> yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. NGO 2. Akademisi 3. Pengamat Sosial 4. Kelompok Swasta, yang punya aprogram pemberdayaan
3.	<i>Stakeholders</i> Kunci	<i>Stakeholders</i> yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali Kota Padang. 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.

Keterlibatan stakeholder ini penting artinya, mengingat banyaknya mitos-mitos tentang peran perempuan yang dilanggengkan dalam cara berfikir stakeholder tersebut, diantaranya bahwa perempuan hanya dan sebaiknya terlibat dalam ranah domestik saja. Tidak perlu perempuan banyak terlibat dalam urusan publik. Melihat pada data, bahwa jumlah penduduk perempuan di kecamatan di kota Padang sangat tinggi, sehingga sebaiknya semua stakeholder berfikir untuk hasil pembangunan yang lebih baik dan akan lebih banyak digunakan oleh perempuan maka perempuan sebaiknya dilibatkan. Karena itu pelatihan pengembangan kapasitas terhadap kelompok stakeholder untuk pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan berbasis kelurahan menjadi *urgent* sifatnya. Oleh karenanya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2018 ini, sebagai bentuk kepedulian kami jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas telah melakukan kegiatan pengabdian dengan judul: " **Pelatihan Peningkatan Kapasitas *Stakeholder* Untuk Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan Di Kecamatan Pauh Kota Padang**".

C. Permasalahan Mitra

Semenjak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan, walaupun sudah berada di tahun keempat sejak perda ditetapkan belum signifikan perubahannya pada peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Musrenbang tingkat kelurahan masih didominasi oleh kelamin laki-laki. Yang walaupun secara jumlah terkadang perempuan banyak hadir dalam kegiatan musrenbang kelurahan, namun belum berperan optimal sebagai

subjek pembangunan. Kehadiran perempuan dalam musrenbang, masih sebatas untuk kegiatan urusan yang dimitoskan harus dikerjakan perempuan, misalnya sebagai seksi konsumsi, sebagai mc dan lain sebagainya, yang secara konten sangat terlihat lemahnya keterlibatan perempuan secara kualitas.

Kecamatan Pauh kota Padang terdiri dari sembilan kelurahan, artinya dalam satu tahun anggaran terselenggara sembilan kali kegiatan musrenbang. Ini adalah kegiatan minimal yang melibatkan kehadiran perempuan secara kualitas dan kuantitas. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan ditegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan minimal harus memenuhi standar 30%, akan tetapi faktanya di setiap keluaran tidaklah seperti itu. Adapun kesembilan kelurahan tersebut adalah:

1. Kelurahan Cupak Tengah
2. Kelurahan Piai Tengah
3. Kelurahan Binuang Kampung Dalam
4. Kelurahan Kapalo Koto
5. Kelurahan Lambung Bukit
6. Kelurahan Limau Manis
7. Kelurahan Limau Manis Selatan
8. Kelurahan Koto Luar
9. Kelurahan Pisang.

Kesembilan kelurahan tersebut, memiliki stakeholder, baik itu menjadi *Stakeholders* Utama yaitu yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, proyek, *Stakeholders* Pendukung yaitu yang tidak memiliki kepentingan secara langsung tetapi memiliki kepedulian, *Stakeholders* Kunci yaitu yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Pengembangan peran perempuan dalam pembangunan akan berjalan dengan baik dan berkembang apabila ketiga *Stakeholders* saling terlibat dan bekerjasama.

D. Solusi Yang Ditawarkan

Dari permasalahan dihadapi, dapat dipecahkan dengan cara dilakukan FGD dan workshop kepada stakeholder di kelurahan yang ada di kecamatan Pauh. Adapun tema materi pembekalan yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dalam pembangunan
2. Keberagaman stakeholder dan perannya dalam pembangunan
3. Pengarusutamaan Gender
4. Perempuan dalam Pembangunan

E. Metode Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode Fokus Group Discussion (FGD) dan workshop kepada kelompok stakeholder. FGD difasilitasi oleh tim peneliti dan workshop mengasah kemampuan peserta terhadap materi-materi berikut:

E. 1. Pendekatan dalam pembangunan

Berbagai pendekatan dalam pembangunan ditujukan adalah untuk memberikan peta dan ruang lebar bagi masyarakat dalam melakukan partisipasi. Khusus dalam hal ini adalah partisipasi kelompok perempuan. Beberapa pendekatan itu antara lain:

1. *Improvement vs Transformation*

Perbedaan antara dua pendekatan *improvement approach* dan *transformation approach*, terletak pada reaksi yang diberikan terhadap eksistensi dan struktur sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendekatan *improvement approach*, menekankan bahwa setiap perubahan yang dilakukan berbasis pada struktur sosial yang ada. Sedangkan dalam pendekatan *transformation approach*, perubahan dirancang untuk terjadi pada level struktur masyarakat melalui *transformasi struktural*.

Improvement approach mengharapkan perubahan bukan berbentuk transformasi struktural, tetapi perubahan dalam cara dan sistem produksi yang mengandalkan pada inovasi ide-ide baru, maka terwujudnya perubahan terutama dalam bentuk peningkatan produktivitas tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan inovasi pembangunan yang dilaksanakan. Dalam hal ini maka perubahan di Kecamatan Pauh diharapkan tidak merubah struktur sosial masyarakatnya. Sedangkan pada pendekatan *transformation approach*, transformasi struktural dapat dilihat sebagai tujuan dan juga sarana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, karena perubahan dalam proses pembangunan masyarakat yang diselenggarakan, target utamanya adalah perubahan struktural. Karena melalui struktur sosial yang baru kemudian dapat dikembangkan kondisi kehidupan yang lebih baik. Kelompok stakeholder perlu mengenal dua pendekatan ini, dalam pembelajaran orang dewasa maka pengetahuan yang baik akan menghasilkan pilihan keputusan pendekatan yang tepat.

2. *Proses vs Hasil Material*

Pembangunan dalam masyarakat terkadang terbentur pada pilihan mementingkan proses atau kepada hasil material. Ketika pembangunan lebih mementingkan proses maka akan lebih menggunakan pola hubungan yang bersifat horizontal baik secara internal antar kelompok, suku atau antar warga masyarakat sendiri, maupun dalam hubungan masyarakat dengan pihak eksternal dengan para kelompok pembaharuan yang merancang perubahan. Pembangunan masyarakat adalah proses menuju suatu kondisi dimana masyarakat menjadi semakin kompeten

dan kritis dalam menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi disekelilingnya. Proses berjalan secara bertahap, dan tidak melompat-lompat, tingkat kepekaan dan daya kritis yang semakin terasah dan semakin tinggi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa, kreativitas, dan partisipasi yang semakin meningkat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Sebaliknya, pembangunan masyarakat yang mementingkan hasil material dianggap lebih menjanjikan perubahan-perubahan konkret secara cepat. Dengan perubahan-perubahan tersebut masyarakat lebih cepat bisa mengukur tingkat perubahan dengan mengejar berbagai ketertinggalan. Masyarakat dengan kerawanan tinggi akan lebih memilih cara ini, karena pada umumnya, dalam masyarakat seperti ini pendekatan proses dianggap terlalu berbelit, butuh waktu lama, dan tidak langsung pada sasarannya.

3. *Selfhelp vs Technocratic*

Pendekatan *selfhelp approach* merupakan pendekatan pembangunan yang mengutamakan sumber, kekuatan dan potensi, dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip demokrasi dan prinsip menentukan nasib sendiri. Dugaan yang mendasari bahwa masyarakat sendiri dapat menjadi pelaku yang sangat berarti sekaligus menjadi pengendali proses pembangunan. Karena pada prinsipnya setiap kelompok masyarakat mempunyai kemampuan dan potensi untuk berkembang atas kekuatan sendiri. Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat sendiri yang:

- a. Menentukan apa yang menjadi kebutuhannya.
- b. Menentukan sendiri bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Melaksanakan sendiri langkah yang sudah diputuskan.

Berbeda pendekatan technocratic yang lebih didasarkan pada pendapat bahwa masyarakat di negara-negara berkembang terutama masyarakat pedesaan, hanya mungkin melaksanakan perubahan dan pembaharuan apabila dimulai suatu tindakan, suatu intervensi dari pihak luar, semisal dari pemerintah. Intervensi dari luar dapat berupa rumusan program dan kegiatan yang sangat lengkap dengan SOP dan pelaksanaannya. Maka pendekatan technocratic atau *technical assistance* dianggap mempunyai kelebihan terutama dalam rangka proses mempercepat usaha mengejar ketertinggalan khususnya dilihat dari aspek ekonomi dan peningkatan produktivitas. Pendekatan ini sangat bersifat top down, masyarakat diminta untuk patuh dan taat pada standar yang ada dalam melakukan perubahan.

4. *Uniformitas vs Variasi Lokal*

Pendekatan *Uniformitas*, lebih menitikberatkan pada keseragaman. Biasanya diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan masyarakat yang dirancang pada tingkat pusat kemudian diterapkan diseluruh lapisan masyarakat di daerah yang ada tanpa memerhatikan perbedaan karakteristik masing-masing daerah, atau sering disebut *blueprint approach* yang juga bersifat *top down*. Pada umumnya alasan yang dikemukakan dalam pendekatan ini adalah

masalah efisiensi, memudahkan mengawasi proses pelaksanaan. Adanya kepastian dalam pelaksanaan program dan terintegrasi secara nasional. Hal yang negatif dari pendekatan ini adalah bahwa tidak memperhatikan karakteristik masyarakat lokal sebagai tempat pelaksana program. Pada sisi yang lain ada pendekatan yang menekankan pada variasi local, yang dibangun atas kesadaran bahwa program-program pembangunan tidak dapat dilakukan secara seragam, justru karena masing-masing kelompok masyarakat dan wilayah mempunyai kondisi dan permasalahan yang berbeda.

E.2. Perempuan dalam Pembangunan

Konsep pembangunan kemampuan peranan perempuan yang dipergunakan berkembang menjadi pemberdayaan perempuan yang berarti meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akslerasi proses pembangunan. Sehingga Karls (1995) memandang bahwa pemberdayaan kaum perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan kaum laki-laki. Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap:

- a. sejauhmana perempuan terlibat dalam program-program pembangunan
- b. sejauhmana kualitas tenaga kerja perempuan
- c. hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi perempuan dalam kegiatan pembangunan
- d. upaya-upaya apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan
- e. Faktor apa sajakah yang dominan berpengaruh terhadap hubungan gender dan
- f. bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi perempuan.

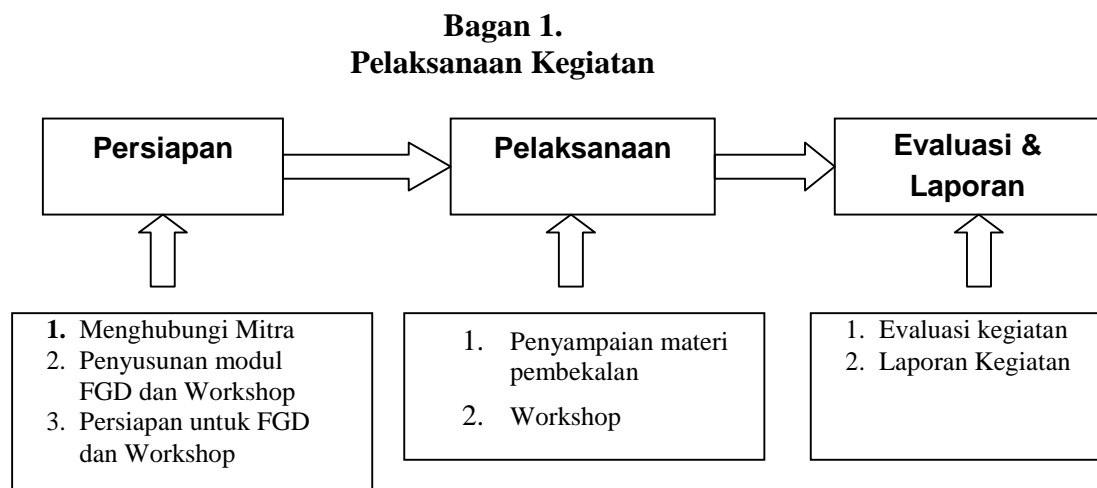
Maka dengan kerangka ini tentunya akan dapat dihasilkan suatu identifikasi sejauhmana peranan perempuan dalam pembangunan pada masa ini.

E.3 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas *stakeholder* untuk pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan berbasis kelurahan ini akan dilakukan dengan FGD dan workshop. Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan selama 2 (dua) hari kerja. Pada hari pertama kegiatan akan dilakukan fokus group diskusi yang menempatkan semua peserta adalah narasumber, yang akan berbagi dan saling belajar strategi pengembangan peran perempuan dalam pembangunan berbasis kelurahan. Sedangkan pada hari kedua akan dilakukan workshop, dimana peserta akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok akan mengemukakan sebuah kondisi yang kerap dihadapi dalam mengembangkan peran perempuan dalam pembangunan berbasis kelurahan. Kasus yang dikemukakan akan disertai dengan tantangan serta solusi yang mereka pecahkan berkelompok.

Kegiatan ini telah dilakukan dengan diikuti oleh 31 orang peserta yang berasal dari Kenagarian PAUH V masing-masing mewakili 8 unsur *stakeholder* yang berbeda, terdiri atas *stakeholder* utama, atau penunjang. Kemudian ditambah dengan 2 *stakeholder* kunci yang masing-masingnya satu orang utusan (Absen Peserta terlampir)

Dalam FGD dan Workshop ini, rencana kegiatan dilaksanakan seperti tergambar dalam bagan 1 berikut ini:



Persiapan:

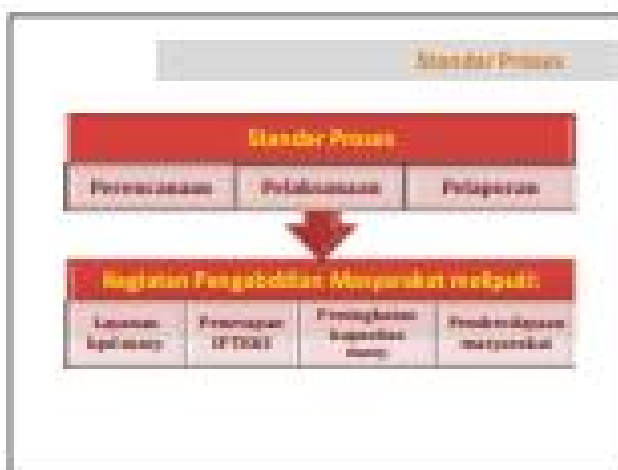
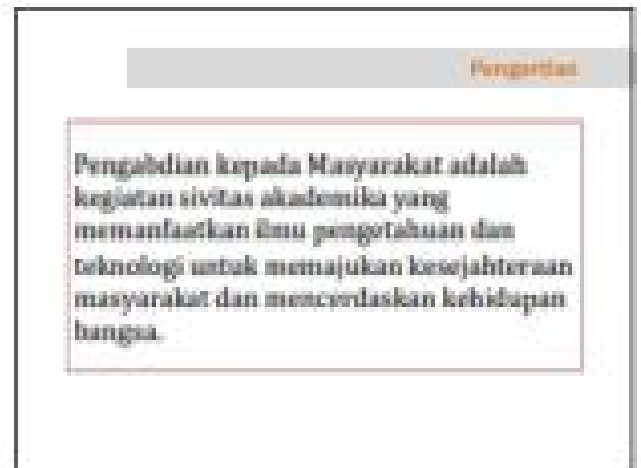
Pada tahap dibangun komunikasi informal dengan Pengurus KAN Kenagarian PAUH V Kecamatan Pauh, dari komunikasi informal ini dilanjutkan dengan komunikasi formal melalui surat yang dikirimkan oleh Dekan FISIP UNAND kepada Ketua KAN Nagari PAUH V Kecamatan Kuranji. Acara FGD dan Workshop disepakati dilaksanakan di Kantor KAN PAUH V, dan Ketua KAN Melalui sekretaris KAN akan mengundang stakeholder terkait yang sudah dikelompokkan menjadi Stakeholder Utama, Penunjang dan Kunci.

Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Rundown Acara sebagai berikut:

Waktu	MATERI	Pelaksana
Sabtu, 17 November 2018 Hari pertama FGD		
09.00-09.30	Pembukaan a. Pembacaan Alquran b. Sambutan Ketua Jurusan AP c. Sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua KAN Pauh V d. Membaca Doa e. Foto Bersama	KAN Nagari PAUH V dan Jurusan Adm Publik
09.30-10.00	Pengantar dan Membangun Kesepatakan Kelas dengan Peserta	Rozidateno Putri
10.00-10.30	Istirahat	Panitia
10.30-12.00	FGD	Tim Jurusan AP
12.00-13.30	ISHOMA	Panitia
13.30-16.00	FGD Lanjutan	Peserta dan Fasilitator
Minggu, 18 November 2018 Hari ke dua WorkSHop		
09.00-10.30	Materi 1: Perempuan dalam Pembangunan	Wewen Kusumi
10.30-11.30	Materi 2: Pendekatan Pendekatan Pembangunan	Yoserizal
11.30-12.00	Materi 3: Stakeholder dan peranannya dalam Pembangunan	Misnar Sitriwanti
13.30-16.00	Kerja Kelompok	Peserta dan Fasilitator
16.30-17.00	Pembacaan Hasil RTL	Peserta

Kegiatan berjalan lancar dan peserta cukup antusias mengikuti rangkaian acara



Lingkup Pengabdian Masyarakat



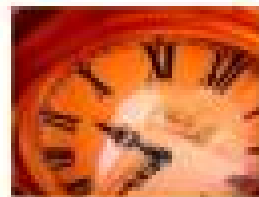
PENGABDIAN MASYARAKAT JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNIVERSITAS ANDALAS

Tema: Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Stakeholder Untuk Pengembangan Peranan
Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Nagari
di Kecamatan Pauah Kota Padang

Dilakukan oleh Dosen –Dosen Jurusan Administrasi Publik FISIP UNAND

- Dr. Rika Ariyanti, M.Si
- Drs. Yusefzaki, M.Si
- Dr. Syamsulzaki, S.ET, M, M.Si
- Dr. Rendi Wika Mulya
- Wenny Kusumadewi, S.ET, M.Si
- Kusdarni, S.ET, MPA
- Rika Lestiana, S.ET, M.Si
- Ruslatah Muli Harefa, S.ET, M.Si
- Murni Sitihandayani, S.ET, M.Si
- M. Syarif Ridwan, S.ET, MPA
- Elham Adhams Alpa S.ET, M.Si

KESEPAKATAN PELATIHAN



Pukul 08.00- 16.30 wib

- Dimulai tepat waktu
- Waktu istirahat digunakan secara efektif

Handphone



- Nada handphone mati
- Menerima telepon dilakukan di luar ruang pelatihan

Dilarang Merokok



- Jika berkeinginan merokok, bisa dilakukan di luar ruang pelatihan, dan tidak mengganggu peserta lain yang tidak merokok.

BERIKUT KERTAMEN TANI RUMAH BANGUNAN DALAM DOKUMEN

	PERANAN PEREMPUAN RUMAH BANGUNAN
	DAFTAR RUMAH BANGUNAN RUMAH BANGUNAN
	DAFTAR RUMAH BANGUNAN RUMAH BANGUNAN
	DAFTAR RUMAH BANGUNAN RUMAH BANGUNAN

APA SAJA ISI PELATIHAN KITA ?

- Perempuan Dalam Pembangunan
- Alur Pembangunan Daerah
- Stakeholder Dalam Pembangunan
- Kerja Kelompok
- Hasil dan Kesepakatan



PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Mengapa harus ada peranan perempuan dalam pembangunan ???

↓

Adanya isu-isu ketidaksetaraan gender yang terjadi

↓

Ada dampak negatif terhadap pembangunan dalam pembangunan karena banyak masalah yang dihadapi oleh perempuan dalam pembangunan yang terjadi

Isu-isu ketidaksetaraan gender yang terjadi

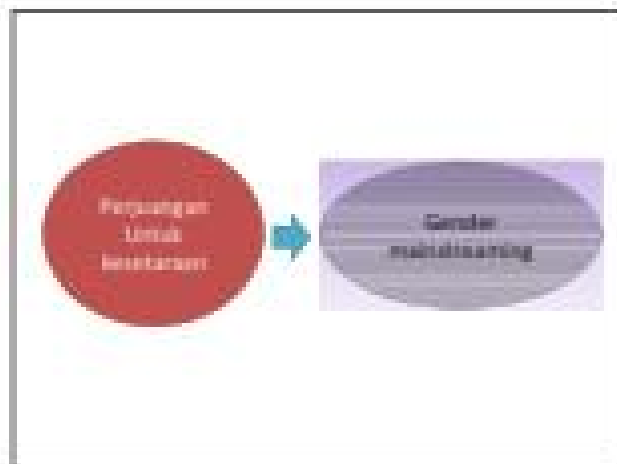
→

Sidang-bidang:

1. Politik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Ekonomi
5. Hukum
6. Media Massa
7. Sains
8. Agama

Contoh ketidaksetaraan yang terjadi di Indonesia

- Berdasarkan hasil pemilu 2014-2019 persentase anggota parlemen perempuan hanya mencapai 17,12 persen (BPS, 2017)
- Dalam pengambilan kebijakan di sektor pemerintahan, perempuan yang menduduki jabatan struktural PNS tidak sampai 30 persen (BPS & KPPRA, 2018)

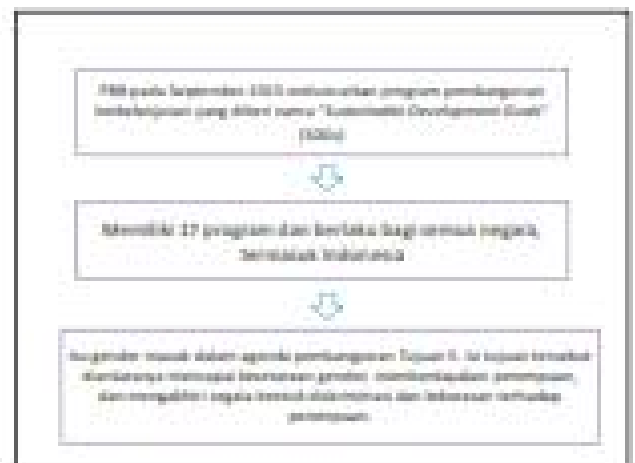


Gender mainstreaming Pengarusutamaan gender (PUG)

Pengintegrasian pengalaman, keahlian, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan

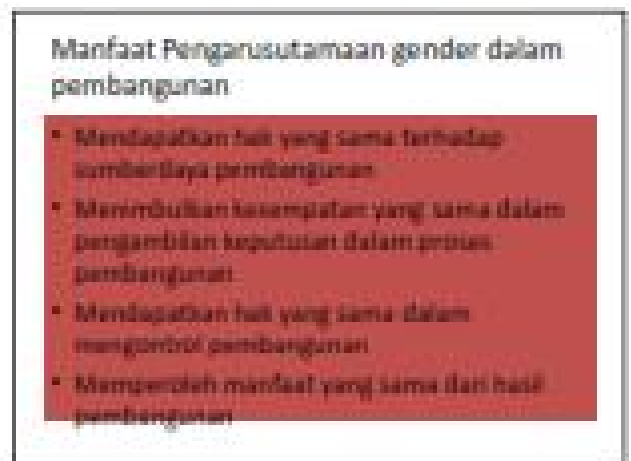
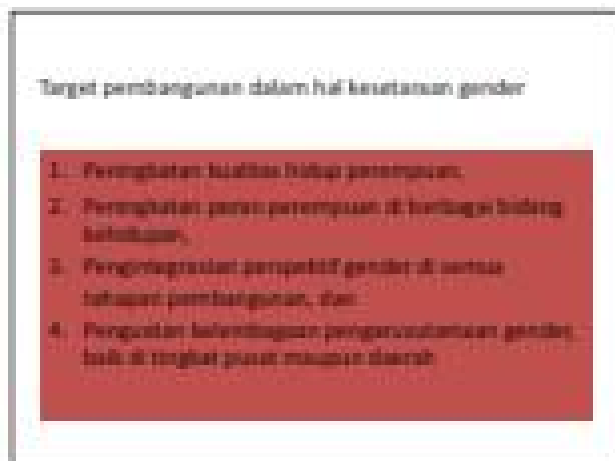
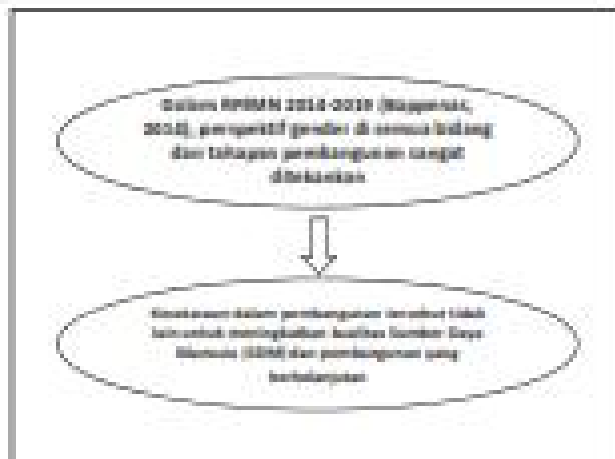
Kesetaraan gender menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

Adanya pandangan bahwa semua orang menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin mereka.



Dasar Hukum Pengarusutamaan gender

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional
- Permenagoti Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di dalam



Contoh Peranan Perempuan dalam Bidang Sosial dan Politik

- Perempuan dianggap sebagai aktor dan bisa dianggap oleh orang-orang lain, baik dan perempuan lain, dapat berpartisipasi dengan baik dalam masyarakat, pendidikan merupakan salah satu yang utama (Jenderson dan Mathews 2006:45)
- Keterlibatan perempuan dalam pembangunan bisa dilakukan oleh perempuan sebagai kebutuhan yang sudah terdapat pemerintah kebutuhan perempuan.

Contoh Peran Perempuan dalam Bidang Ekonomi



Perempuan memiliki pekerjaan, keahlian dan keterampilan yang dapat memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan hidup.

Peran Perempuan dalam Kegiatan Pendidikan

- Perempuan lebih memfokuskan pada pemberian pendidikan kepada anak-anak dan kaum perempuan itu sendiri.
- Pada ibu dan kaum perempuan di desa-desa bisa memfokuskan pendidikan bagi anak-anaknya mulai dari tingkat sekolah dasar (TK dan SD), SMP dan SMA hingga perguruan tinggi.

Perlu peningkatan kegiatan dalam organisasi sosial seperti PKK, Simba Benda, kelompok rumah dan lain-lain untuk meningkatkan peran perempuan, kegiatan tersebut sebagai sarana sosialisasi dan belajar bagi kelompok perempuan perempuan lain.



Regulasi kegiatan ini harus didukung sebagai sarana pemerintah bagi partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

Alur dan proses pembangunan



Pembangunan





Tujuan dan Fungsi Pokok Perencanaan Pembangunan

1. Menetapkan arah dan tujuan pembangunan

2. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan

3. Menetapkan alokasi dan distribusi sumber daya pembangunan

4. Menetapkan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan

5. Menetapkan indikator, target, dan strategi pembangunan

Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan

- 1. **Strategi pembangunan jangka panjang (20-25 tahun)**
- 2. **Strategi pembangunan jangka menengah (5-10 tahun)**
- 3. **Strategi pembangunan jangka pendek (1-5 tahun)**
- 4. **Strategi pembangunan jangka menengah (5-10 tahun)**
- 5. **Strategi pembangunan jangka pendek (1-5 tahun)**

1. Nasional

2. Regional

3. Lokal

Tujuan Perencanaan Pembangunan

- 1. **Tujuan Pembangunan Nasional**
- 2. **Tujuan Pembangunan Regional**
- 3. **Tujuan Pembangunan Lokal**
- 4. **Tujuan Pembangunan Internasional**

Proses perencanaan pembangunan

1. Vision

2. Mission

3. Strategy

4. Policy

5. Action

Proses perencanaan pembangunan

1. Vision

2. Mission

3. Strategy

4. Policy

5. Action



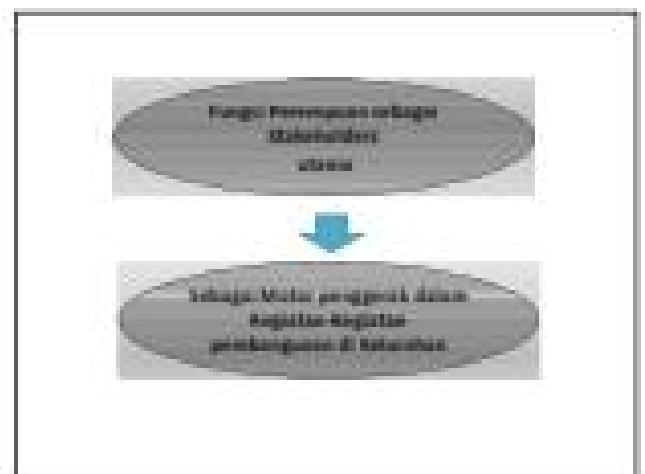
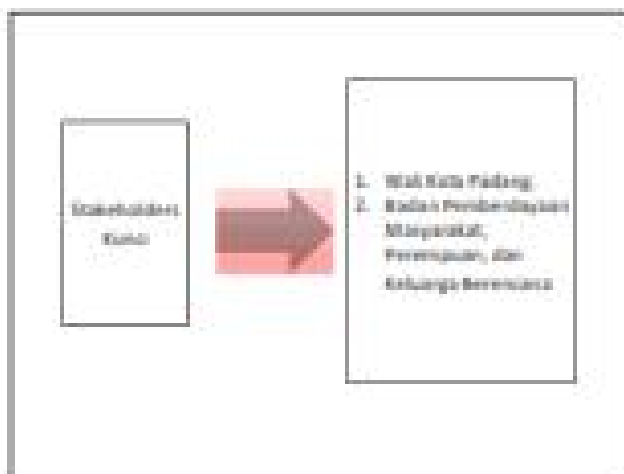
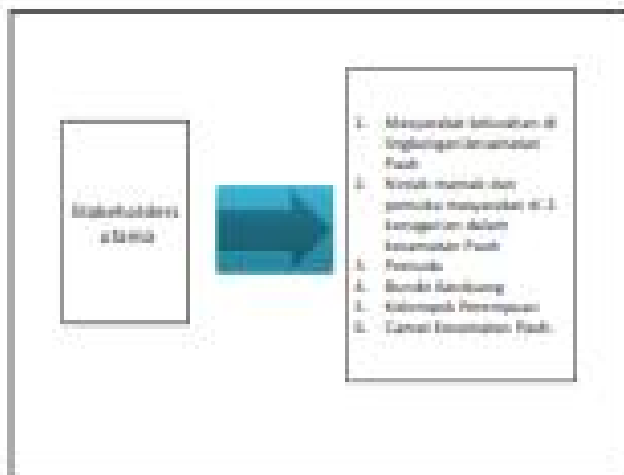
Stakeholder dan Peranannya dalam Pembangunan

Siapa itu Stakeholder

Stakeholder (Pemangku kepentingan) adalah perorangan dan kelompok yang secara aktif terlibat dalam kegiatan, atau yang terkena dampak, baik positif maupun negatif, dari hasil pelaksanaan kegiatan.

- Jenis Stakeholders** (Crossby 1992)
- Pemangku kepentingan utama, yaitu kelompok stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek.
 - Pemangku kepentingan penunjang atau pendukung, adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.
 - Pemangku kepentingan kunci, yaitu stakeholder yang memiliki kaitan langsung secara legal dalam hal pengambilan keputusan.









F. Partisipasi Mitra

Mitra mempunyai partisipasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Secara rinci keterlibatan mitra seperti Tabel 3:

Tabel 3: Partisipasi Mitra

Tahap Kegiatan	Partisipasi
Persiapan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengurusan izin dan berdialog dengan mitra2. Menyediakan lokasi kegiatan3. Menyusun bersama peta stakeholder di Kecamatan Pauh4. Mengundang peserta
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Memfasilitasi pelaksanaan FGD dan Workshop2. Membantu peserta untuk mapping permasalahan di level stakeholder3. Berdiskusi interaktif dengan peserta kegiatan4. Fasilitator antara peserta dengan tim pengabdian
Evaluasi dan Laporan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan memberi masukan terhadap Rencana Tindak Lanjut (RTL)2. Memberikan masukan terhadap proses evaluasi yang dilakukan oleh tim3. Memberikan masukan terhadap laporan yang dibuat tim.4. Membuat laporan khusus untuk mitra.

G. Terget Luaran

Yang menjadi Target luaran dalam dari FGD dan Workshop ini adalah, seperti yang terlihat di tabel di bawah ini:

Tabel 4
TARGET KELUARAN DARI KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

No	Permasalahan Mitra	Solusi	Kegiatan	Keluaran
1.	Kapasitas stakeholder perlu diselaraskan dengan perkembangan capaian SDGs yaitu pengembangan peran perempuan dalam pembangunan berbasis kelurahan	dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas stakeholder	FGD dan workshop	◇ Pengetahuan dan kemampuan stakeholder bertambah, terkait masalah : a. Pendekatan dalam pembangunan b. Keberagaman stakeholder dan perannya dalam pembangunan c. Pengarusutamaan Gender d. Perempuan dalam Pembangunan

Semua luaran tersebut telah berhasil di capai dalam acara yang berlangsung pada Tanggal 17 dan 18 November 2018

H. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan jangka waktu 3 bulan, Jadwal yang direncanakan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan I Juli	Bulan II Agustus	Bulan III September
1	Survei Lokasi, Pengurusan izin dan diskusi dengan pihak manajemen mitra	X		
2	Diskusi tim pengabdian untuk persiapan pembuatan bahan Pelatihan		X	
3	Merancang materi pelatihan dan pengadaan bahan bagi peserta pelatihan		X	
4	Kegiatan FGD dan workshop			X
5	Laporan			X

I. Anggaran Biaya

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat jurusan Administrasi Publik di kecamatan Pauh kota Padang ini membutuhkan biaya sebesar Rp. 10.000.000., (*Sepuluh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

a. Bahan Aus (Material Pengabdian)

No	Nama Bahan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah
1	Kertas HVS	2 rim	35.000	70.000
2	USB 6GB	1 buah	80.000	80.000
3	HP Toner Catdrige	1 buah	850.000	850.000
4	Block Note	25buah	5.000	125.000
5	Ballpoint	25buah	5.000	125.000
6	Map file Plastik	25 buah	5.000	125.000
7	Fotocopy bahan	1 paket	250.000	250.000
8	Spanduk	1 buah	100.000	100.000
9	Voucer hp	1 paket	50.000	50.000
10	Pelaporan	1 paket	110.000	110.000
Jumlah				1.885.000

b. Transportasi

No	Tujuan/Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Konfirmasi tempat pengabdian dan pelaksanaan a. Transportasi b. Konsumsi 4 orang	350.000 140.000
2	Transportasi Pelaksanaan kegiatan 1 hari	350.000
3	Transportasi peserta (25 orang x 100.000)	2.500.000
Jumlah		3.340.000

c. Pertemuan dan Diskusi

No	Kegiatan	Volume	Biaya Satuan	Jumlah
1	Konsumsi diskusi internal	4 kali	200.000	800.000
2	Pembuatan modul	1 paket (25 buah)	75.000	1.875.000
3	Konsumsi peserta dan panitia (snack)	35 orang x2	15.000	1.050.000
4	Makan siang peserta	35 orang	30.000	1.050.000
Jumlah				4.775.000

d. Rekapitulasi Anggaran.

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp)
1	Bahan untuk Materi pengabdian	1.885.000
2	Transportasi	3.340.000
3	Pertemuan/diskusi	4.775.000
Jumlah		10.000.000

J. Daftar Pustaka

-----, (2014) Statistik Politik 2014, Badan Statistik Jakarta Indonesia

Ibrahim, Anis (2008), "*Legislasi dan Demokrasi: Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah.*" Malang: In-Trans Publishing.

K. LAMPIRAN :



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71266, Faksimile : 0751- 71266
Laman : fisip.unand.ac.id, e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor 2446 /UN16.08.D/PP/2018

Selubungan dengan surat Ketua Jurusan Administrasi Publik nomor : 127/UN16.08.5.4/PP/2018 tanggal 17 September 2018, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas menugaskan :

No	Nama	NIP/NIDN	Pangkat/ Gol	Keterangan
1	Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA	198111072003122001/ 0007118107	Penata/III/c	Ketua
2	Dr. Syamsulizaldi, S.IP, SE, MM	197312201993031002/ 0030127308	Pembina Tk.IV/b	Anggota
3	Dr. Ria Arianty, M.Si	197302132008122001/ 0014058601	Penata/III/c	Anggota
4	Dr. Rani Ekha Putera, S.IP, M.PA	198105032005011001/ 0003038101	Penata/III/c	Anggota
5	Kondarus, S.IP, M.PA	197308252001122001/ 0025087311	Penata/III/c	Anggota
6	Riza Liesmara, S.IP, M.Si	197908192003012003/ 0019087906	Penata/III/c	Anggota
7	Ees. Yoserizal, M.Si	196008251989011001/ 0023086013	Pembina Utama Muda /IV/c	Anggota
8	Wewen Kammi Rahayu, S.AP, M.Si	198605142010122000/ 0014058603	Penata Muda Tk.I/III/b	Anggota
9	Iham Aldelano Azra, S.IP, M.PA	198509182015041001/ 0018098502	Penata Muda Tk.I/III/b	Anggota
10	Muhammad Ihsan Kaballah, S.IP, M.PA	198509042009121002/ 0004098501	Penata Muda Tk.I/III/b	Anggota

untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Stakeholder untuk Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Keluhan di Kecamatan Pauh Kota Padang" yang diselenggarakan pada :

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Padang, 21 September 2018

Dekan



Dr. Alfian Miko, M.Si

NIP. 196206211988111001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Administrasi Publik
2. Dosen Dilingkungan FISIP Universitas Andalas

DAFTAR BUKTI PENERIMAAN BANTUAN TRANSPORTASI


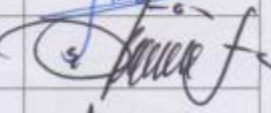
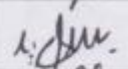
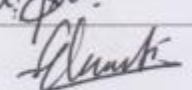
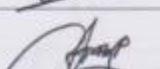

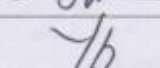
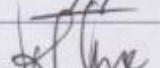

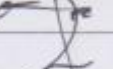


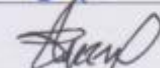

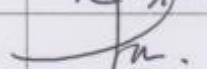

Nama Kegiatan : Pengabdian Masyarakat Jurusan Adm. Publik
 Hari/Tanggal : Sabtu-Minggu/ 17-18 Nov 2018
 Tempat : Kantor KAN Pauh Kecamatan Pauh, Kota PADANG
 Tema : Pelatihan Peningkatan Kapasitas Stakeholder Untuk Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Nagari

No	NAMA	ALAMAT	T. TANGAN
1	Tokliun	Ps. Baru	
2	Haniwati	Pauh	
3	St. Waman	Pauh	
4	JASNA	KAPALO KOTA	
5	Hj. Satri	Cupak Tangah	
6	Hj. ERNAWATI	Cupak Tangah	
7	ASNA	- - -	
8	JUSMA JENI	- - -	
9	ASNI AGUS	- - -	
10	KARNI DNL	- - -	
11	RATINGS	Kp. DILAM	
12	BAJOK KAN	Cupak Tangah	
13	HEWNY	Kep. KOTD	
14	JUSNA WANDY	- - -	
15	Hj. Satri	- - -	
16	JUSNA	Baru	
17	ENDRIANI	Kp. DILAM	
18	Marni Seta	Kp. Balam	
19	Gustauranti	Ps. Baru	
20	JENRI	Cupak Tangah	

21	M. Uthel Haf	Piai Tengah	Ma
22	M. Musnawati	Piai Tengah	Ma
23	MASNIAR	Piai Sangal	Ma
24	M. Kipli Padiko Raja	Sungai Bedong	Ma
25	H. Nur aini	B. Baru	Ma
26	Ilma Gemah Sari	Piai	Ma
27	Syamsul Bahri R. G	Pantai V	Ma
28	Hamdani Mahin Basri	Pantai V	Ma
29	H. Apriatno	B. Baru	Ma
30			

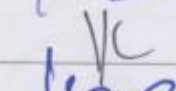
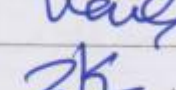
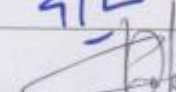
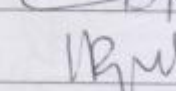
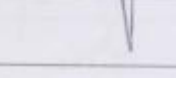
DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Pengabdian Masyarakat Jurusan Adm. Publik
Hari/Tanggal : Minggu/ 18 Nov 2018
Tempat : Kantor KAN Pauh Kecamatan Pauh, Kota PADANG
Tema : Pelatihan Peningkatan Kapasitas Stakeholder Untuk Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Nagari

No	NAMA	ALAMAT	T. TANGAN
1	Hj. SARNI	Cupak Tengah	
2	JUSMA YENNI	Cupak Tengah	
3	EMON/PDK. ALAM	PILAKUT, SG. SAPIH	
4	Hj. ERNAWATI	Cupak Tengah	
5	ASNA	CUPAK TENGAH	
6	YENDRI	- - -	
7	Yohanna Wati	Kepala Koto	
8	Karnidur.	Cupak Tengah	
9	Marnis Sekas.	Kp Dalam.	
10	Endriani	. . .	
11	JUSMA	KAPALO KOTO	
12	HARRY	kep. koto.	
13	Hj. Sukri.	kep. koto.	
14	RATINUS	Kp. DALAM.	
15	Hj. Nur'aini	Ps. Baru	
16	ASNI AGUS	Ps Batu.	

17	Mulhelmi	Piai Tengah	
18	Iti Masnawati	Piai Sangah	
19	MASNIAR	Piai Tengah	
20	A. Ham dari	Kamp M. Putih	
21	Silvia Permata Sari	Piai Tengah	
22	R. S JON	Ps BARU. KAN	
23	Gustaviauthi	Ps. Baru	
24	Jannati Iro	Tanah. Masriat	

25	Zulkifli Poduko Rajo	Sei Bolang.	
26	Samudrala	Kp Pinang	
27	Dr. Wamen	Pulau	
28	Dr. Paldi us	Ps. Baru	
29	DAHLIAWATI	Pulau	
30	Ria Ariany	Kayur	
31	Yosei	Dosen	
32	Rozidatono Putri	Dosen AP	
33	ANDRI	Sunggalang	
34	Rosa Liesmana	Dosen AP	

35	Muhammad Iskhak Kabbullah	- " -	
36	Kusdarini	Sasur AP	
37	Wewen PR	Rosen AP	
38	Debora Aprianingsih	Mahasiswa	
39	Fori Elha putera	Dosen AP	
40			

Biodata Ketua Tim Kegiatan

A. Identitas Diri

Nama : ROZIDATENO PUTRI HANIDA, S.IP, M.PA
 NIP/NIK : 19811107 200312 2 001
 Tempat Tanggal Lahir : Talang, Solok 7 November 1981
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status Perkawinan : Menikah
 Agama : Islam
 Golongan/Pangkat : III c /Penata Muda
 Jabatan Fungsional Akademik : Lektor
 Alamat Rumah : Jalan Bariang Indah II/75 Anduriang Padang
 Alamat Email : ozidateno@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
2003	S1	UGM	Administrasi Negara
2010	S2	UGM	Administrasi Negara

PELATIHAN PROFESIONAL		
Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2004	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (Diklat Prajab III)	Lembaga Administrasi Negara Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

PENGALAMAN JABATAN		
Jabatan	Institusi	Tahun...sd...
Sekretaris Senat	Senat Fakultas Ilmu Sosial Politik	2015 s/d Sekarang
Ketua Lembaga	Laboratorium Ilmu Administrasi Negara	2011 s/d 2014

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana / Nominal
2016	Monografi Nagari Lubuak Malako	Ketua Peneliti	Nagari Lubuak Malako / 63.000.000
2015	Partisipasi Pemilih: Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang di Kabupaten Solok Selatan	Ketua Peneliti	KPU Kabupaten Solok Selatan 10.000.000
2015	Partisipasi Pemilih: Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang di Kota Solok	Ketua Peneliti	KPU Kota Solok Selatan 10.000.000
2014	Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup: Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Pengendalian Lingkungan di Era Otonomi Daerah	Ketua Peneliti	Dikti / 12.000.000
2013	Analisis Program dan Kegiatan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Untuk meningkatkan Fungsi	Ketua Peneliti	Pemda Solok Selatan / 47.000.000

	Koordinasi Bappeda		
2012	Pemilu Badunsanak: Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan Dalam Pemilu/Pilkada di Sumatera Barat	Anggota	Dikti / 63.000.000
2010	Analisis Anggaran Pemilukada	Ketua Peneliti	Seknas FitraThe Asia Foundation Maarif Institute For Culture And Humanity / 372.000.000
2010	Analisis Anggaran Belanja Daerah (Studi Terhadap Profil Belanja Kota Solok Guna Meningkatkan Fungsi Budgeting)	Ketua Peneliti	Dikti / 73.000.000
2010	Studi Evaluasi PNPM 2010	Anggota Peneliti	Lembaga Penelitian Smeru dan Word Bank / 168.000.000
2009	Studi Pelaksanaan Pelayanan Dasar di Kabupaten Sleman (Studi Tentang Pelaksanaan Layanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Sleman)	Ketua Peneliti	Maarif Institute dan The Asia Foundation / 98.000.000
2009	Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah (Studi Tentang Proses penetapan Program dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Sleman)	Peneliti Utama	Sumber Dana: Mandiri
2009	Studi Kinerja Pengelolaan Anggaran Pemerintahan Daerah Sumber Dana: The Asia Foundation	Anggota Peneliti	Sumber Dana: The Asia Foundation/ 300.000.000
2009	Penelitian Kualitatif Komite Sekolah Di DIY dan Jawa Tengah Sumber Dana: Word Bank	Anggota Peneliti	Sumber Dana: Word Bank / 350.000.000
2007	Representasi Nilai-nilai Adat dan Budaya Minangkabau dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat	Anggota Peneliti	Sumber Dana: Dikti / 67.000.000
2006-2007	Evaluasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dalam Penerapannya Pada Provinsi Sumatera Barat	Anggota Peneliti	Sumber Dana: Balitbangda Propinsi Sumbar / 38.000.000
2005	Penguatan Peran Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik.	Ketua Peneliti	Sumber Dana: Dikti / 10.000.000
2004	Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan publik di Nagari di Kabupaten Solok.	Anggota Peneliti	Sumber dana: Pemda Kabupaten Solok / 47.000.000
2004	Evaluasi Pemerintahan Nagari di Propinsi Sumatera Barat	Anggota Peneliti	Sumber Dana: Balitbangda Propinsi Sumbar / 38.000.000
2003	Pergeseran Kekuasaan dan Kepemimpinan Pada Pemerintah Lokal dan Implikasinya pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.	Peneliti Utama	Sumber Dana: Mandiri

KARYA TULIS ILMIAH

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
-------	-------	-----------------

2016	The Analysis of Communal Land Management for the Investment Activity at Local Government Level	Makalah dalam AAPA 2016 Annual Conference di Burapha University, Chonburi Thailand.
2015	Develop Self Reliance of Village Governement Based On Management Of Communal Lend	UNIMA IAPA International Annual Conference 2015 The role Of Local Government In Global Competition” ISBN 978-602-73770-0-4, Manado, 2015
2015	Provision of Market Insfrastructure Based on The Socio Cultural Condition of Indonesian Community.	IJASOS International e –Journal Advances In Social Sciences, Vol 1 No. 2 2015
2015	Analysis of Policy of Planning and Budgeting Making Local Government Planning Policy More Significant in Indonesia	IJASOS International e –Journal Advances In Social Sciences, Vol 1 No. 2 2015
2013	Institutional Capability Perencanaan di Kabupaten Pemekaran Pada Proses Perencanaan Pembangunan di Daerah.	Makalah dalam Kongres IAPA I di Jakarta 22-24 Oktober 2013
2012	Kebijakan Anggaran Pemilu Kada: Wajah Reformasi Birokrasi di Daerah (Studi: Perumusan Kebijakan Anggaran PemiluKada Sumatera Barat).	Makalah dalam Konferensi Administrasi Negara V di Malang 6-8 Juli 2012:
2011	Analisis Anggaran Belanja Daerah (Studi Terhadap Profil Belanja Kota Solok Guna Meningkatkan Fungsi Budgeting.	Makalah dalam Konferensi Administrasi Negara IV di Makasar 7-9 Juli 2011:
2010	Mengadvokasi Anggaran Daerah Melalui Penguatan Masyarakat Berbasis Agama Untuk Kebijakan Anggaran Yang Mensejahterakan	Buku Bunga Rampai Transformasi Administrasi Negara. ISBN: 978-602-99311-3-6
2010	Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah (Kasus: Proses Penetapan Program dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Sleman).	Jurnal Penelitian Politik Volume 7 Nomor 1 Tahun 2010. ISSN: 1829-8001
2010	Perempuan Dalam Organisasi Kepemudaan yang Berwawasan Gender	Makalah yang disampaikan pada Diskusi Obrolan Angkringan “Peranan Perempuan Dalam Organisasi Kepemudaan” 15 Februari 2010
2009	Musrenbang Sebagai Instrumen Efektif Dalam Penganggaran Partisipatif,	Makalah yang disampaikan dalam acara Persiapan Kader Muda KNPI Kabupaten Sleman Dalam Musrenbang, 27 Desember 2009
2007	Pesoalan Gender dan Gerakan Kemahasiswaan di Kampus	Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Mingguan di Komisariat HMI FISIP Padang
2005	Solok Tunggu Pemimpin Putra Asli Daerah	Media Indonesia
Juni 2004	Pergeseran Kekuasaan dan Kepemimpinan pada Nagari di Sumatera Barat	Jurnal Analisa Politik Vol 2 No. 7
2002	Desentralisasi dalam Konsep Otonomi Daerah, Peluang Berdemokrasi di Daerah Otonom	Diikutsertakan Dalam Lomba Penulisan Essai Mahasiswa Dalam Rangka Sewindu IRE Yogyakarta
2001	Pengembangan Potensi Kawasan Solok Pantai Selatan DI. Yogyakarta Menuju Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.	Diikutsertakan dalam Kreativitas mahasiswa, dengan program Kreativitas Mahasiswa Penelitian Oleh DIKTI

PESERTA KONFRENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2016	AAPA (Asian Association for Public Administration) 2016 Annual Conference, di Burapha University, Chonburi, Thailand	AAPA, PAAT, and the Faculty of Political Science and Law of Burapha University
2015	International Indonesia Forum for ASIAN Studies	IIFAS Kerjasama dengan Andalas University
September 2015	Indonesia Asociation for Public Administration (IAPA) International Annual Conference 2015	IAPA bekerjasama dengan Universitas Manado
2015.	Socio-Int15- International Conference on Education Social Sciences And Humanities in Istanbul, Turkey	OCERINT- International Organization Center of Academic Research
2014	Indonesia Asociation For Public Administration (IAPA) International Annual Conference 2015	IAPA bekerjasama dengan Universitas Indonesia
2012	Konferensi Administrasi Negara V di Malang 6-8 Juli 2012	Universitas Brawijaya Malang
2011	Indonesia Asociation For Public Administration (IAPA) International Annual Confeence 2011	IAPA bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin
2010	Indonesia Asociation For Public Administration (IAPA) International Annual Confeence 2010	IAPA bekerjasama dengan Universitas Padjajaran

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN MASYARAKAT			
Tahun	Judul Pengabdian	Jabatan	Sumber Dana / Nominal
2014	Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi Relawan Demokarasi Kota Padang Panjang	Fasilitator Utama	KPU Kota Padang Panjang
22 Februari 2014	Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi Relawan Demokrasi Kabupaten Solok	Fasilitator Utama	KPU Kabupaten Solok
15 Februari 2014	Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi Relawan Demokrasi Kabupaten Pasaman Barat	Fasilitator Utama	KPU Kabupaten Pasaman Barat
2013	Pembicara dalam Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu Dan Pemilukada	Pemateri	KPU Propinsi Sumbar
2013	Tim Seleksi Anggota KPUD Kab. Lima Puluh Kota Sumatera Barat.	Anggota Tim	KPUD Kab. Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
2010	Peranan Perempuan Dalam Organisasi Kepemudaan	Pembicara	KNPI Kabupaten Sleman, Yogyakarta
13-18 Des 2009	Peserta Kursus Intensif Demokrasi Berbasis Hak Azazi Manusia, Kekuasaan Kesejahteraan dan Demokrasi. Hotel Jayakarta, Yogyakarta	Peserta	PWD Universitas Gadjah Mada.
2009 to 2010	District Program Officer Maarif Institute Sleman For Project Strengthening Muhammadiyah's Role In Monitoring And Controlling Government Activity In Sleman Jogjakarta	Program Officer	Maarif Institute Sleman
Nov 1 to 4, 2008	Fasilitator workshop "Diklat Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja	Fasilitator workshop	Kabupaten Pelawalan, Propinsi Riau 2008,

	Program Pembangunan		Pekanbaru, Riau.
June to July 2008	Governance Reform: Reformasi Tata Pemerintahan Dalam Menghadapi Era Demokrasi dan Pasar Terbuka	Panitia Workshop dan Konverensi	Magister Public Administration Universitas Gadjah Mada.
2008 to 2009	Tutor Di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2008/2009	Tutor	Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
2007 to 2008	Tutor Di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2007/2009	Tutor	Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
2007 to 2010	Wakil Sekretaris KNPI DPD Sumbar	Wakil Sekretaris	KNPI DPD Sumbar
Maret 29, 2008	Peserta Workshop Penulisan Artikel	Peserta Workshop	Pusat Studi Penalaran dan Kepenulisan (PUSPEK) jogjakarta
Mart 27, 2008	Diskusi Buku “Memahami Pemikiran Rene Descartes dan Pengaruhnya Bagi Ilmu Pengetahuan Modern	Peserta	-
Mart 20, 2008	Peserta Seminar Nasional Kehutanan Indonesia “Ecolife as a Modern Lifestyle”	Peserta Seminar	
Juli 5 to 8, 2007	Peserta Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah	Peserta Pelatihan	
Mei 04, 2007	Peserta Workshop Bisnis Media, Jurnalistik, Marketing & Advertising	Peserta Workshop	
April 28, 2007	Peserta Seminar Reformasi dan Pelayanan Publik	Peserta Seminar	Yayasan Syarikat Oesaha Adabiah Padang Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
April 17, 2007	Moderator of Diskusi Ilmiah dengan Judul Kaum Lesbian Pada Masyarakat Lesbian Minangkabau ”Coming Out” Terhadap Identitas Seksual	Moderator	-

PIAGAM/PENGHARGAAN		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2015	Best Paper pada UNIMA IAPA International Seminar & Annual Conference Tahun 2015	Indonesian Association for Public Administration

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Organisasi	Jabatan
2016- Sekarang	Asian Association For Public Administration	Anggota
2014-sekarang	Indonesia Asosiation For Public	Anggota

	Administration (IAPA)	
2010-2014	Indonesia Asosiation For Public Administration (IAPA)	Wakil Bendahara

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Padang, 25 Mei 2017

Ketua Peneliti



(ROZIDATENO PUTRI HANIDA S.IP., M.P.A.)

NIP/NIK 198111072003122001